

---

## TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN KURIKULUM KOLABORATIF DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR

Oleh

Fredy Hermanto<sup>1</sup>, Himmatul Ulya<sup>2</sup>, Noviani Achmad Putri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Semarang

Email: [fredy@mail.unnes.ac.id](mailto:fredy@mail.unnes.ac.id)

---

### Article History:

Received: 18-12-2024

Revised: 17-01-2025

Accepted: 23-01-2025

### Keywords:

Kurikulum Kolarboratif,  
Merdeka Belajar

**Abstract:** *Beberapa kendala ditemukan pada Prodi Pendidikan IPS pada implementasi kurikulum merdeka, salah satunya adalah rekognisi mata kuliah yang relevan dengan program-program yang diambil oleh mahasiswa selama mereka mengikut MBKM baik yang diselenggarakan oleh kementerian maupun universitas. Sumber data penelitian diperoleh secara langsung di lapangan, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi pada pembelajaran di Prodi Pendidikan IPS. Teknik Focus Group Discussion (FGD) juga digunakan untuk mendukung pengumpulan data maupun analisis mengenai tema-tema tertentu yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif analitik. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan data bahwa diperlukan adanya kesepakatan penyamaan CPL bagi seluruh anggota program studi Pendidikan IPS serta sebaran mata kuliah pada semester yang sama hingga dapat mengakomodir pelaksanaan program MBKM seperti pertukaran mahasiswa. Dengan adanya penyamaan CPL dan sebaran mata kuliah maka mahasiswa yang melakukan mobilisasi tetap mendapatkan standar yang sama dengan prodi asal. Kurikulum kolaborasi ini juga perlu melibatkan kebutuhan industri hingga mahasiswa lulusan prodi IPS memiliki standar lulusan yang sama*

---

## PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam sistem pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang menawarkan pendidikan lebih tinggi dari sekolah menengah, memerlukan kurikulum yang relevan dan komprehensif untuk

memastikan bahwa para mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran. Termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik [1]. Dalam lingkungan pendidikan tinggi yang dinamis dan cepat berkembang, kurikulum harus terus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam bidang akademik dan industri. Kurikulum yang baik juga dapat membantu memperkuat reputasi perguruan tinggi dan meningkatkan daya tariknya bagi para calon mahasiswa dan industri, serta meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan.

Kurikulum yang relevan di perguruan tinggi harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan stakeholder, seperti mahasiswa, industri, dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan dapat menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin kompleks. Kurikulum yang relevan harus menekankan pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam praktek, serta mempromosikan pembelajaran seumur hidup dan kepemimpinan. Kurikulum juga harus responsif terhadap perubahan dalam bidang akademik dan industri, sehingga dapat mempersiapkan lulusan untuk mengikuti perkembangan dan inovasi terbaru. Dalam konteks ini, perguruan tinggi harus mempertahankan keterlibatan aktif dengan stakeholder, memantau kebutuhan mereka, dan memperbarui kurikulum secara berkala untuk menjawab tuntutan pasar kerja yang selalu berubah dan memastikan lulusan dapat berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat dan dunia kerja.

Kurikulum yang komprehensif pada perguruan tinggi meliputi seluruh aspek pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa. Hal ini mencakup kompetensi akademik dan praktik yang relevan dengan bidang studi mahasiswa, serta pengembangan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan etika yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja dan masyarakat. Kurikulum harus didesain dengan memperhatikan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat, dengan memasukkan elemen pembelajaran yang terkait dengan kemajuan sosial dan teknologi yang terkini. Sebuah kurikulum yang komprehensif juga harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti organisasi mahasiswa, magang, proyek penelitian, atau kegiatan sosial lainnya. Dalam rangka untuk menghasilkan lulusan yang holistik dan siap untuk berkontribusi dalam masyarakat, kurikulum yang komprehensif harus terus diperbarui dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa itu tetap relevan dengan perkembangan terbaru di bidang akademik dan industri.

Kualitas pendidikan tinggi ditentukan 6 unsur, yaitu; (1) Learning outcomes yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasarkerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas belajar mengajar yang memadai [2]. Secara sistem kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada tahapan pokok yang dilalui yakni input, proses, output dan outcome. Adanya asosiasi program studi dapat menjadi modal yang cukup kuat dalam hal perumusan kurikulum yang akan digunakan oleh prodi sejenis. Sebagai contoh adalah APRIPSI (Asosiasi Program Studi

Pendidikan IPS Indonesia). visi yang dimiliki oleh APRIPSI adalah Memperkokoh kerja sama kelembagaan antar Program Studi Pendidikan IPS se-Indonesia dalam menghasilkan calon pendidik dan ahli pendidikan IPS sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Visi tersebut di terjemahkan melalui salah satu misi yang dimilikinya yang membahas mengenai learning outcome yakni “Menyusun Learning Outcome jenjang Sarjana, Magister dan Doktor Pendidikan IPS”. Penyusunan learning outcome perlu memperhatikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang merupakan perwujudan dari pendidikan berupa pengetahuan, sikap serta keterampilan umum dan khusus. Melalui APRIPSI, CPL pada Prodi Pendidikan IPS se-Indonesia telah disepakati bersama. CPL kemudian dapat dikembangkan oleh masing-masing Prodi sesuai dengan ciri khas yang dimilikinya.

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan kurikulum merdeka yang memberikan fasilitas kepada mahasiswa dapat menempuh tiga semester diluar prodi [3]. Beberapa kendala ditemukan pada Prodi Pendidikan IPS pada implementasi kurikulum merdeka, salah satunya adalah rekognisi mata kuliah yang relevan dengan program-program yang diambil oleh mahasiswa selama mereka mengikut MBKM baik yang diselenggarakan oleh kementerian maupun universitas. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian [4]. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama dengan Asosiasi untuk melakukan tinjauan terhadap kurikulum yang dimiliki oleh Prodi Pendidikan IPS sehingga dapat sesuai dengan tuntutan pada kurikulum merdeka belajar. Penelitian ini diarahkan pada upaya kerjasama dengan APRIPSI selaku asosiasi yang menaungi Prodi Pendidikan IPS se-Indonesia serta langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meninjau kurikulum yang dimiliki oleh Prodi Pendidikan IPS S1 Universitas Negeri Semarang hingga sesuai dengan kurikulum MBKM dan memenuhi target khususnya pada IKU 2 Perguruan tinggi

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Prodi Pendidikan IPS FIS bekerjasama dengan APRIPSI. Sumber data penelitian diperoleh secara langsung di lapangan, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi pada pembelajaran di Prodi Pendidikan IPS. Teknik *Focus Group Discussion* (FGD) juga digunakan untuk mendukung pengumpulan data maupun analisis mengenai tema-tema tertentu yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif analitik. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis yang digunakan adalah analisis data seperti yang dijelaskan Miles, Huberman dan Saldana [5], yang meliputi tahap: a) pengumpulan data; b) kondensasi data; c) penyajian data; dan d) pengambilan kesimpulan. Langkah tersebut digunakan dalam penelitian ini, sedangkan siklus berikutnya berupa pengembangan produk awal, uji coba dan penyempurnaan produk, pengujian produk serta diseminasi, implementasi dan institusionalisasi sebagai langkah untuk penelitian lanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kampus merdeka yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam menentukan jalannya pendidikan [6]. Program ini memberikan mahasiswa keleluasaan untuk memilih mata kuliah, dosen, bahkan institusi pendidikan yang diinginkan sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan karir mereka [7]. Program yang dikeluarkan juga memungkinkan terjadinya mobilisasi pendidikan, program ini memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk melakukan mobilitas pendidikan, yaitu memilih perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain yang diinginkan sesuai dengan preferensi mereka [8]. Dalam konteks mobilitas pendidikan, mekanisme transfer kredit menjadi penting. Mahasiswa yang berpindah dari satu institusi ke institusi lain dapat mentransfer kredit-kredit yang telah mereka peroleh sebelumnya [9]. Ini membantu mencegah kehilangan kredit yang sudah diperoleh dan memudahkan kelancaran perjalanan pendidikan mereka. Mobilitas pendidikan memungkinkan mahasiswa untuk mengakses program studi yang mungkin tidak tersedia di perguruan tinggi asal mereka [10]. Hal ini memperkaya pilihan akademis mahasiswa dan memberikan mereka akses ke pengetahuan dan keterampilan yang lebih spesifik sesuai dengan minat mereka.

Salah satu program dalam mobilisasi pendidikan adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Dalam program ini mahasiswa perlu melakukan beberapa persiapan antara lain :

1. Pilihan Institusi Pendidikan: Mahasiswa dapat memilih institusi pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri yang terlibat dalam program pertukaran. Pemilihan ini dapat didasarkan pada minat akademis, fasilitas pendidikan, atau keinginan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar lingkungan kampus asal.
2. Persyaratan Partisipasi: Mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program pertukaran biasanya harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti pencapaian akademis yang baik, kemampuan bahasa, dan kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademis di institusi tujuan.
3. Durasi Pertukaran: Program pertukaran mahasiswa merdeka dapat memiliki durasi yang bervariasi, mulai dari satu semester hingga satu tahun akademik penuh. Mahasiswa dapat memilih durasi yang sesuai dengan rencana studi mereka dan keinginan pribadi.
4. Pengakuan Kredit: Sebagai bagian dari mobilitas pendidikan, pengakuan kredit juga menjadi faktor penting. Mahasiswa perlu memastikan bahwa kredit yang diperoleh selama program pertukaran dapat diakui dan diintegrasikan ke dalam rencana studi mereka di institusi asal.

5. Kegiatan Akademis dan Kultural: Selama program pertukaran, mahasiswa tidak hanya terlibat dalam kegiatan akademis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengalami budaya baru. Mereka dapat terlibat dalam kegiatan kultural, bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang, dan memperluas jaringan profesional dan sosial mereka.
6. Dukungan dan Bimbingan: Institusi asal dan institusi tujuan biasanya memberikan dukungan dan bimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti program pertukaran. Ini dapat mencakup bimbingan akademis, informasi tentang kehidupan di tempat tujuan, dan dukungan logistik

Dalam upaya mobilisasi pendidikan tersebut maka institusi pendidikan khususnya Prodi Pendidikan IPS di Indonesia memiliki problem yang sama. Pada tahapan ini diketahui adanya permasalahan program MBKM yang selama pandemi dilakukan secara daring hingga tidak terlalu mengganggu aktivitas perkuliahan yang dilakukan oleh mahasiswa, namun setelah pandemi berlalu kegiatan tersebut harus dilakukan secara luring. Proses rekognisi mata kuliah mengalami diskusi yang cukup beragam karena CPL serta CPMK yang harus dijaga, namun disisi lain mahasiswa berhak mendapatkan rekognisi maksimal hingga 20 sks. Urgensi penyesuaian kurikulum prodi pendidikan IPS terhadap program merdeka belajar perlu menjadi perhatian. Salah satu program MBKM adalah Permata Merdeka yang difasilitasi oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Program ini merupakan program pertukaran mahasiswa dari seluruh Indonesia, mereka dapat memilih kampus tujuan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Adanya pertukaran mahasiswa ini tentunya harus memperhatikan sebaran mata kuliah yang akan diambil oleh mereka di kampus tujuan. Adanya perbedaan sebaran mata kuliah tersebut menyebabkan munculnya masalah mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa karena tidak sesuai dengan sebaran kurikulum pada kampus asal. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah adanya kurikulum kolaboratif hingga dapat mengakomodir merdeka belajar yang telah dicanangkan hingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif.

Kurikulum kolaboratif ini diperlukan agar tiap program studi IPS memiliki capaian pembelajaran lulusan yang sama hingga dapat mengakomodir program MBKM yang dilakukan oleh pemerintah hingga di prodi IPS manapun mahasiswa mengikuti program MBKM tetap memiliki CPL yang sama dengan prodi asalnya. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terlebih dahulu kepada beberapa ketua program studi IPS. Beberapa hal yang didapatkan antara lain:

1. Kurikulum kolaboratif memastikan bahwa mata kuliah dan keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri. Hal ini meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja.
2. Tantangan yang lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat mungkin memiliki prioritas dan tujuan yang berbeda, sehingga kesulitan dapat muncul dalam mencapai kesepakatan yang harmonis.
3. Kesulitan Mengukur Kinerja dan Evaluasi. Menilai efektivitas kolaborasi dan pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan dapat menjadi tantangan, karena sifat yang kompleks dan multifaset dari kerjasama tersebut.
4. Merancang kurikulum pendidikan tinggi adalah tugas yang kompleks dan memerlukan pemikiran menyeluruh. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan

dalam merancang kurikulum pendidikan tinggi melibatkan aspek akademis, sosial, dan kebutuhan pasar kerja

5. Dalam penyusunan kurikulum harus dipastikan bahwa kurikulum mencakup mata kuliah dan keterampilan yang relevan dan dapat diaplikasikan di dunia nyata
6. Proses kerjasama dan kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi, industri, dan masyarakat dalam penyusunan kurikulum kolaborasi melibatkan serangkaian langkah dan keterlibatan aktif dari semua pihak terlibat
7. Kurikulum kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi, industri, dan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap keterampilan dan kompetensi lulusan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja dan masyarakat, kurikulum ini dirancang untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan dalam dunia kerja
8. Melalui kurikulum kolaborasi, lulusan dapat mengembangkan portofolio keterampilan yang lebih luas dan relevan, meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja yang terus berkembang. Dengan memasukkan perspektif industri dan masyarakat, kurikulum ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan memberikan dampak positif dalam berbagai konteks profesi.
9. Kurikulum kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi, industri, dan masyarakat dapat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan relevan dengan tuntutan dunia kerja.
10. Kurikulum kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi, industri, dan masyarakat dapat memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Integrasi perspektif industri dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan eksternal dapat membawa inovasi, relevansi, dan keterlibatan yang lebih besar.

Kegiatan lanjutan yang dilakukan kemudian melakukan FGD dengan beberapa ketua program studi IPS yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Asosiasi Program Studi Pendidikan IPS Indonesia. FGD ini dilakukan untuk menyepakati adanya kurikulum kolaborasi. Kesepakatan dalam FGD ini salah satunya adalah penyamaan CPL pada seluruh program studi IPS se Indonesia untuk jejang S1. CPL yang disepakati adalah sebagai berikut:

#### **Sikap**

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- (2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- (3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- (4) Berperan ssebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- (5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- (6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- (7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- (8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

- (9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- (10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

#### **Pengetahuan**

- (1) Menguasai konsep teoretik ilmu-ilmu sosial yang merupakan bahan PIPS;
- (2) Menguasai konsep teoretik ilmu pendidikan sebagai bekal guru IPS;
- (3) Menguasai konsep, teori, dan metode pendidikan IPS;
- (4) Menguasai konsep, teori, dan metode penelitian pendidikan IPS;
- (5) Menguasai konsep, teori, dan metode penelitian sosial;
- (6) Memiliki wawasan tentang nilai-nilai nasionalisme dan kewirausahaan;
- (7) Memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan isu-isu aktual baik tingkat lokal, nasional, maupun global.
- (8) Memiliki penguasaan bahasa Indonesia maupun asing yang diperlukan untuk mendukung pengembangan wawasan pengetahuan.

#### **Keterampilan.**

##### **Keterampilan Umum:**

- (1) Mampu melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan atau teknologi , melalui penalaran ilmiah, dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, dan inovatif.
- (2) Mampu melakukan pengkajian pengetahuan dan atau teknologi, di IPS berdasarkan kaidah keilmuan yang disusun dalam bentuk skripsi/laporan tugas akhir, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan metode atau kaidah rancangan baku.
- (3) Mampu mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni yang dapat diakses oleh masyarakat akademik.
- (4) Mampu mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai media kepada masyarakat sesuai dengan bidang IPS.

##### **Keterampilan Khusus:**

- (1) Mampu melaksanakan pembelajaran IPS yang menitikberatkan kepada pengembangan dan pemantapan karakter peserta didik.
- (2) Mampu mengaplikasikan IPTEKS pada bidang PIPS dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- (3) Mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial sebagai bahan ajar dalam pembelajaran IPS.
- (4) Mampu menggali masalah-masalah sosial dan mengaplikasikan ilmu-ilmu sosial dalam menyelesaikan masalah sosial melalui pendekatan IPS dengan pendekatan tematik.
- (5) Mampu melakukan penelitian ilmiah dengan berbagai pendekatan dan metode penelitian PIPS serta
- (6) menyusun karya ilmiah dan mengkomunikasikan secara efektif, akurat, dan akuntabel.

Selain itu disepakati pula Disepakati bersama Mata Kuliah konversi kegiatan MBKM, pertukaran mahasiswa atau kuliah umum. Kurikulum inti yang menjadi penciri kemampuan lulusan S1. Kesepakatan mata kuliah ini juga berupa sebaran pada semesternya hingga saat terjadi pertukaran mahasiswa antara prodi IPS se Indonesia mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa. Mata kuliah tersebut antara lain :

- (1) Konsep Dasar IPS – Semester 1 – 2 sks
- (2) Strategi Pembelajaran IPS – Semester 4 – 3 sks
- (3) Perencanaan Pembelajaran IPS – Semester 5 – 3 sks
- (4) Media Pembelajaran IPS – Semester 5 – 3 sks
- (5) Evaluasi Pembelajaran IPS – Semester 5 – 3 sks
- (6) Kurikulum Pendidikan IPS - Semester 5 – 3 sks

Kesepakatan mengenai CPL pada seluruh program studi IPS di Indonesia tentunya perlu diimplementasikan dengan baik. Namun dalam pelaksanaan implementasinya tentunya akan terdapat tantangan, beberapa tantangan tersebut antara lain :

1. Tingkat dukungan dan keterlibatan dari pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, industri, dan masyarakat, adalah kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum kolaborasi ini.
2. Pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan manfaat implementasi kurikulum kolaborasi
3. Keterbukaan institusi terhadap perubahan dan fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan kondisi yang berkembang dapat memengaruhi adaptabilitas kurikulum.
4. Keterampilan dan pengetahuan dosen dalam konteks kurikulum kolaborasi dapat memengaruhi efektivitas implementasinya. Dengan demikian maka diperlukan adanya Pelatihan dan pengembangan dosen untuk memahami metode pengajaran kolaboratif dan tuntutan industri
5. Integrasi teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran dalam kurikulum kolaborasi

Untuk mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi yang responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan, beberapa strategi dan prinsip perlu dipertimbangkan antara lain :

1. Analisis Kebutuhan dan Tren. Perlu dilakukan analisis menyeluruh tentang kebutuhan dan tren di masyarakat, industri, dan teknologi. Identifikasi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh lulusan untuk menghadapi tantangan masa depan.
2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan. keterlibatkan aktif pemangku kepentingan seperti dosen, mahasiswa, industri, dan masyarakat dalam proses pengembangan kurikulum. Hal tersebut akan mendapatkan umpan balik secara teratur untuk memastikan keterlibatan mereka dalam merancang kurikulum.
3. Fleksibilitas dalam Desain Kurikulum. Rancang kurikulum dengan struktur yang fleksibel, memungkinkan penyesuaian dan penambahan mata kuliah sesuai dengan perubahan kebutuhan. Perlu disertakan opsi pilihan atau modul yang dapat diakses mahasiswa sesuai minat dan tujuan karir mereka.
4. Keterlibatan Industri dan Magang. membangun kemitraan erat dengan industri untuk memahami kebutuhan dan tren terkini. Kegiatan magang, proyek kolaboratif, atau pembicara industri untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa.
5. Integrasi Teknologi. Diperlukan pertimbangkan integrasi teknologi yang relevan dalam proses pembelajaran. Perlu dipastikan bahwa mahasiswa mendapatkan

keterampilan digital yang diperlukan untuk menghadapi lingkungan kerja yang semakin terotomatisasi.

6. Pendidikan Karakter dan Keterampilan Lunak. Selain keterampilan teknis, berfokus pada pengembangan keterampilan lunak seperti komunikasi, kreativitas, dan kepemimpinan. Perlu ada dorong bagi mahasiswa untuk memahami dan mengembangkan karakter positif yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
7. Pendekatan Interdisipliner. Fasilitasi pendekatan interdisipliner dalam pengembangan kurikulum. Diperlukan adanya dorongan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan solusi yang holistik terhadap masalah kompleks.
8. Proyek Kolaboratif dan Pembelajaran Berbasis Proyek. Perlu disertakan proyek-proyek kolaboratif dalam kurikulum yang memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Proyek-proyek ini dapat melibatkan kerja sama dengan industri atau proyek penelitian yang relevan.
9. Pendekatan Pembelajaran Hidup. Mahasiswa perlu difasilitasi pendekatan pembelajaran sepanjang hayat dengan mempromosikan kebiasaan belajar mandiri. Dorong mahasiswa untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka setelah lulus.
10. Evaluasi Berkelanjutan. Tetap lakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kurikulum. Revisi dan perbarui kurikulum secara teratur berdasarkan hasil evaluasi, umpan balik dari pemangku kepentingan, dan perkembangan terbaru di industri dan masyarakat.
11. Peningkatan Literasi Digital. Diperlukan adanya fokus pada pengembangan literasi digital mahasiswa. Integrasikan keterampilan pengolahan informasi, literasi media, dan literasi data dalam kurikulum.
12. Pemberdayaan Mahasiswa, perlu diberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Dorong mereka untuk mengusulkan perubahan dalam kurikulum dan berpartisipasi dalam proyek-proyek kolaboratif.
13. Keberlanjutan dan Etika. Perlu ditanamkan pemahaman tentang keberlanjutan dan etika dalam kurikulum. Fokus pada tanggung jawab sosial dan dampak etis dalam pengambilan keputusan

Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ini dalam pengembangan kurikulum, lembaga pendidikan tinggi dapat menciptakan program-program yang tidak hanya mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan teknis, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk menghadapi perubahan dinamis dalam masyarakat, teknologi, dan lingkungan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal dalam penelitian ini antara lain ; (1) terdapat kesepakatan CPL untuk semua prodi IPS Se Indonesia, (2) Dalam menyikapi program MBKM maka diperlukan adanya kesamaan sebaran mata kuliah pada setiap prodi IPS hingga dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mobilisasi antar perguruan tinggi, (3) Penyusunan kurikulum kolaborasi hendaknya melibatkan industri

serta memperhatikan perkembangan teknologi informasi hingga lulusan yang ada benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar dan masyarakat

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kurikulum-dan-fungsinya/>
- [2] Romdloni, M. (2021). Problematika Pendidikan Tinggi, Kurikulum Dan Pendidik Di Indonesia. *Jurnal Al-Murabbi*, 7(1), 116-125.
- [3] Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18
- [4] Bhakti, Y. B., Simorangkir, M. R. R., Tjalla, A., & Sutisna, A. (2022). Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi. *Research and Development Journal of Education*, 8(2), 783-790.
- [5] Milles, Huberman and Saldana. (2014). *Qualitatif Data Analysis Edition 3*. London: Sage Publication
- [6] Krisnanik, E., Saphira, Q., & Indriana, I. H. (2021). Desain Model MBKM Dan Kolaborasi Kerja Sama Model Pentahelix Guna Meningkatkan Daya Saing Lulusan. *Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer)*, 5, 138-142.
- [7] Rahmi, Y. N., & Dewi, F. (2022, June). Peran Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Lulusan Terampil di Dunia Industri Melalui Kolaborasi Merdeka Belajar. In *Prosiding Seminar Nasional (Kolaborasi Pendidikan dan Dunia Industri)* (Vol. 1, No. 1, pp. 213-220).
- [8] Wati, C. N., & Sukestiyarno, Y. L. (2022, September). Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 202-207).
- [9] Suastika, I. K., Suwanti, V., Ferdiani, R. D., & Harianto, W. (2022). Analisis Kepuasan Stakeholder pada Implementasi Kurikulum MBKM Fakultas Sains dan Teknologi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1657-1667.
- [10] Asiah, N. (2021). *Implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka (studi pada fakultas ilmu sosial dan hukum universitas negeri makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).